

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Umum**

Penyusunan LKIP Kecamatan Blimbing Tahun 2021 merupakan laporan kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Pengukuran pelaksanaan program kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan tingkat pencapaian rencana strategis yang merupakan pedoman dalam melaksanakan visi misi dari Kecamatan dalam jangka menengah. Namun penyusunan LKIP Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tahun anggaran 2021 yang merupakan bagian dari program jangka lima tahunan, sehingga dalam pelaporan LKIP diperlukan feed back control dengan membandingkan kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya yakni Tahun 2021. Dalam latar belakang ini akan diuraikan tentang visi, misi, tugas dan fungsi dan wewenang dari Kecamatan Blimbing Kota Malang.

## **B. Organisasi Perangkat Daerah**

### Struktur Organisasi

OPD Kecamatan Blimbing dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

Sedangkan tugas kecamatan lebih rinci didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwal) Malang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

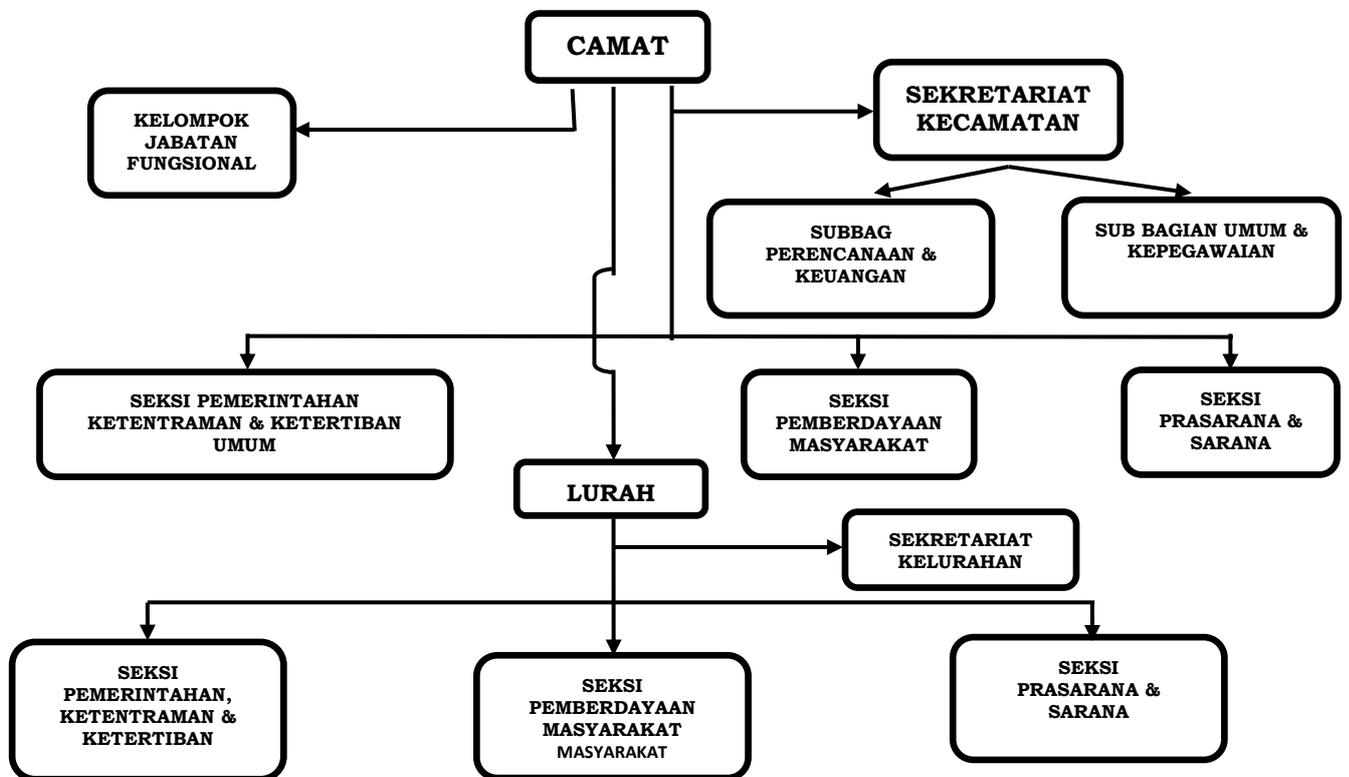
Adapun struktur organisasi Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan Perda di atas adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang membawahi :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- e. Seksi Prasarana dan Sarana;
- f. Kelurahan, terdiri dari ;
  - Lurah;
  - Sekretariat Kelurahan;
  - Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban;
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - Seksi Prasana dan Sarana.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara diagram maka Struktur Organisasi Kecamatan ditunjukkan sebagaimana gambar (2) berikut ini :

Gambar (2)  
Struktur Organisasi Kecamatan



(Sumber : Peraturan Walikota Malang)

### C. SUMBER DAYA KECAMATAN BLIMBING

#### 1. Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Blimbing tidak terlepas dari aparatur yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Adapun data personil Kecamatan Blimbing sebagaimana berikut :

Tabel 1  
Jumlah Pegawai Kecamatan Blimbing Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2021

No	Nama OPD / Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		L	P	JML
1	Kecamatan	15	8	23
2	Arjosari	6	4	10
3	Balearjosari	6	6	12
4	Polowijen	6	3	9
5	Purwodadi	5	5	10
6	Blimbing	6	6	12
7	Pandanwangi	6	4	10
8	Purwantoro	6	4	10
9	Bunulrejo	5	3	8
10	Kesatrian	7	3	10
11	Polehan	7	4	11
12	Jodipan	5	4	9
	JUMLAH	80	54	134

Tabel 2  
Data Pegawai Kecamatan Blimbing Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2021

No	Nama OPD	Tingkat Pendidikan										Jml
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	
1	Kecamatan	0	1	14	0	0	0	0	5	3	0	23
2	Arjosari	0	1	3	0	0	0	0	6	0	0	10
3	Balearjosari	0	1	6	0	0	0	0	5	0	0	12
4	Polowijen	0	0	5	0	0	0	0	2	2	0	9
5	Purwodadi	0	0	5	0	0	0	0	4	1	0	10
6	Blimbing	1	0	6	0	0	1	0	4	0	0	12
7	Pandanwangi	0	1	5	0	0	0	0	4	0	0	10
8	Purwantoro	0	0	4	0	0	0	0	4	2	0	10
9	Bunulrejo	0	0	7	0	0	0	0	1	0	0	8
10	Kesatrian	0	1	4	0	0	0	0	3	2	0	10
11	Polehan	0	2	4	0	0	0	0	5	0	0	11
12	Jodipan	0	0	4	0	0	0	0	5	0	0	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>134</b>

Tabel 3  
Data Pegawai Kecamatan Blimbing Berdasarkan Golongan  
Tahun 2020

No	Nama OPD	Golongan					JUMLAH
		IV	III	II	I		
1	Kecamatan	3	9	11	0	23	
2	Arjosari	0	7	2	1	10	
3	Balearjosari	0	8	3	1	12	
4	Polowijen	0	7	2	0	9	
5	Purwodadi	1	6	3	0	10	

6	Blimbing	0	8	3	1	12
7	Pandanwangi	0	6	4	0	10
8	Purwanto	1	6	3	0	10
9	Bunulrejo	0	5	3	0	8
10	Kesatrian	0	6	3	1	10
11	Polehan	0	6	4	1	11
12	Jodipan	0	6	3	0	9
	JUMLAH	5	80	44	5	134

Tabel 4  
Data Pegawai Kecamatan Blimbing Berdasarkan Eselon  
Tahun 2020

No	Nama OPD	ESELON						JML
		II A	II B	III A	III B	IV A	IV B	
1	Kecamatan	0	0	1	1	3	2	7
2	Arjosari	0	0	0	0	1	4	5
3	Balearjosari	0	0	0	0	1	4	5
4	Polowijen	0	0	0	0	1	4	5
5	Purwodadi	0	0	0	0	1	4	5
6	Blimbing	0	0	0	0	1	4	5
7	Pandanwangi	0	0	0	0	1	4	5
8	Purwanto	0	0	0	0	1	4	5
9	Bunulrejo	0	0	0	0	1	4	5
10	Kesatrian	0	0	0	0	1	4	5
11	Polehan	0	0	0	0	1	4	5
12	Jodipan	0	0	0	0	1	4	5
	JUMLAH	0	0	0	0	14	46	60

#### D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, selain melaksanakan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan, Camat juga sebagai penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum dan secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan. Pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat bertujuan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai ujung tombak pemerintah daerah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Kecamatan memiliki peran strategis, baik tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia maupun sumber pembiayaan. Sebagai perangkat daerah, kecamatan berperan dalam penyusunan rencana strategis, Rencana Kerja Tahunan, pengendalian maupun evaluasi pelaksanaan rencana strategis.

#### 1. Penyusunan Rencana Strategis

Sebagai perangkat daerah yang membawahi kelurahan-kelurahan, dalam penyusunan Rencana Strategis, kecamatan berperan sebagai administrator dan *integrator* sekaligus. Sebagai *integrator*, kecamatan memadukan semua usulan masyarakat yang ditampung dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dari semua kelurahan untuk mencapai sasaran pembangunan kecamatan dan selanjutnya diolah dan diadministrasikan di kecamatan (peran administrator).

Rencana strategis kecamatan merupakan acuan bagi kelurahan-kelurahan untuk menyusun rencana kerja masing-masing dan menjadi dasar dalam perumusan rencana kegiatan dan anggaran. Rencana strategis juga harus memadukan antara usulan masyarakat di tingkat kelurahan (*bottom up*) dan sasaran yang ingin dicapai di tingkat kota (*top down*). Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses perencanaan pembangunan kecamatan.

#### 2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satu fungsi kecamatan adalah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi kecamatan. Kecamatan juga menjalankan fungsi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kecamatan juga berperan dalam memastikan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Seiring dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Blimbing, adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi dan Proses Bisnis

Semangat yang diusung dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah efisiensi dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada kebutuhan restrukturisasi organisasi yang mencerminkan proses bisnis yang efisien dan dinamis.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menuntut aparatur kecamatan memiliki kemampuan yang cukup dalam menyelenggarakan pelayanan dan pemerintahan umum, mengkoordinir pemberdayaan masyarakat serta mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Di samping itu, perubahan proses bisnis dan upaya sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar wilayah juga membutuhkan inovasi yang terus menerus seiring dengan perubahan kebijakan dan strategi yang terjadi baik dalam siklus tahunan maupun lima tahunan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan kapasitas aparatur menjadi sebuah keniscayaan.

3. Peningkatan pembangunan infrastruktur

Salah satu indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2018-2023 adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indikator ini kemudian diturunkan menjadi indikator perangkat daerah dalam hal ini kecamatan, yaitu indeks kepuasan layanan prasarana sarana. Berdasarkan indikator ini maka pembangunan infrastruktur kecamatan harus memenuhi berbagai kriteria antara lain, ketersediaan fisik (*availability*), kualitas fisik (*quality*), kesesuaian (*appropriateness*), kemanfaatan (*utility*), penyerapan tenaga kerja (*job creation*) serta kontribusi terhadap perekonomian.

## **E. Permasalahan Utama Organisasi**

Merespon Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, beberapa permasalahan utama yang ditemui di Kecamatan Blimbing adalah sebagai berikut:

1. Proses perencanaan belum sepenuhnya berbasis *outcome* dan penyesuaian rencana strategis OPD dan RPJMD belum maksimal.
2. Belum diimplementasikannya proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum ter-*cascading* secara individu sedang indikator program dan kegiatan belum menggunakan prinsip *specific, measurable, achievable, realistic* dan *timebond* (SMART).

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

## A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023, Kecamatan Blimbing menyusun sasaran strategis, indikator program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Blimbing Tahun 2018-2023.

Rencana strategis dan RPJMD merupakan penerjemahan visi misi Walikota Malang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2023. Adapun Bagan alur visi, misi, tujuan Kepala Daerah dan sasaran strategis Kecamatan Blimbing dapat dilihat dalam bagan berikut:

**Gambar 2.1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**



### 1. Tujuan dan Sasaran

Renstra Kecamatan Blimbing Tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Malang telah menetapkan Tujuan pembangunan Kecamatan Blimbing yaitu: Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel. Berdasarkan gambar dalam Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1  
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra  
Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80,28	80,43	80,58	80,73
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan	4,13	4,21	4,29	4,37	4,45
		Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,75	3,80	3,80	3,85	3,90

Sumber Data : Perubahan Renstra Kecamatan Blimbing 2018-2023

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
2. Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan, capaian kinerja dan keuangan
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum
5. Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana publik di lingkungan Kecamatan

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Melaksanakan pengadaan perangkat hardware pendukung kegiatan pelayanan administrasi
3. Menerapkan system pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi
4. Mengoptimalkan standard operasional prosedur (SOP) pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien
5. Menerapkan sistem jaringan komunikasi dan informasi antar kelurahan yang bersifat koordinatif
6. Membangun mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan yang partisipatif dan mengakomodir pengarusutamaan kesetaraan gender
7. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat/ kelompok masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan
8. Membangun sarana dan prasarana fisik lingkungan tematik
9. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat menumbuh kembangkan potensi/ skill/ keterampilan/ pengetahuan masyarakat dengan adanya pelatihan-pelatihan
10. Mengoptimalkan peran pemuda dalam program dan kegiatan pembangunan kecamatan
11. Menumbuhkan dan meningkatkan kualitas eksistensi forum anak di setiap kelurahan sampai tingkat kecamatan
12. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk percepatan layanan dasar kesehatan di setiap kelurahan
13. Mendorong peningkatan kualitas kader di posyandu balita dan posyandu lansia di tiap-tiap kelurahan

14. Mendukung peningkatan layanan keluarga berencana di setiap kelurahan
15. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pos PAUD di tiap-tiap kelurahan dalam rangka pembinaan
16. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Pendidikan guna peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini
17. Menciptakan sistem serta mekanisme pengamanan lingkungan yang innovative, integratif, partisipatif dan koordinatif
18. Meningkatkan kualitas tenaga pendukung pada pos tanggap bencana
19. Mengoptimalkan layanan informasi tanggap bencana yang cepat, efektif dan efisien

### B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang di tetapkan dalam SK Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023

Adapun IKU Kecamatan Blimbing sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2:  
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80	80	80,2	80,3	80,4
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80,28	80,43	80,58	80,73

3.	Meningkatnya pemberdayaan	Indeks Pembangunan	4,13	4,21	4,29	4,37	4,45
----	---------------------------	--------------------	------	------	------	------	------

	masyarakat dan komunitas	Masyarakat (IPMasy) Kecamatan					
4.	Meningkatnya pemerataann pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,75	3,80	3,80	3,85	3,90

Sumber: Perubahan Renstra Kecamatan Blimbing 2018-2023

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat di capai dalam tahun 2021 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan di ketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Blimbing Kota Malang Tahun 2021 secara rinci adalah sebagai berikut :

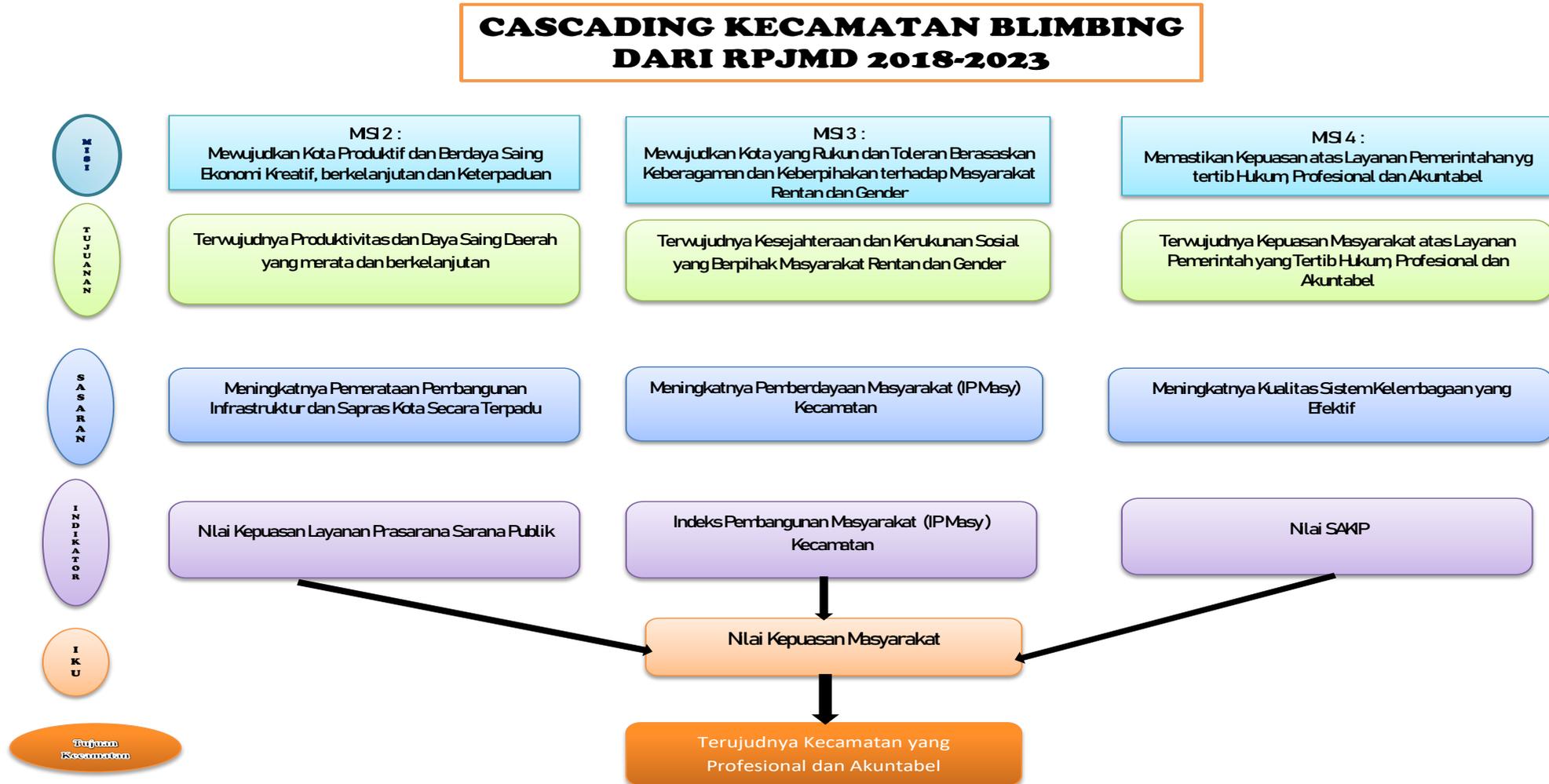
Tujuan 1 : Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel  
 Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran strategi	Indikator kinerja	target	program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,80	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik	3.697.493.665,-
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan	4,29	Program Pemberdayaan Masyarakat	16.482.508.994,-
Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,43	Program Pelayanan Kesekretariatan	20.310.240.820,-
			Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum	5.246.469.701,-

Sumber Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Blimbing Tahun 2021

Selanjutnya, dalam penentuan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja, peran masing-masing unit kerja digambarkan dalam cascading berikut :

Gambar 2.2: Cascading Kecamatan Blimbing Tahun 2021





#### D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Blimbing Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan tekniss, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai	Pencapaian
110 keatas	Sangat tercapai/sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / tidak berhasil

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah jawaban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Blimbing Kota Malang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Tujuan : Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel
- Sasaran : 1. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah  
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas  
3. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Saprass secara terpadu

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut adalah :

#### **B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Laporan kinerja tahunan ini disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun anggaran 2021. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dalam perjanjian kinerja dengan realisasi. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Kinerja  
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (5)/(4)	Pencapaian (%)	Keterangan
			K	K	K	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,43	80,94	100,63%	Realisasi Tahun 2021 merupakan estimasi berdasarkan target Tahun 2021
		Persentase Dokumen, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%			
		IKM Perangkat Daerah	80,2	80,52	100,40%	
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	4,29	4,26	99,36%	Hasil Pencapaian ini berdasarkan Hasil Survey Tingkat Kota yang sifatnya Makro
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75%	66%	88%	
		Rasio Linmas per RT	1	64%	64%	
3.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,80	4,14	109%	Hasil Pencapaian ini berdasarkan Hasil Survey Tingkat Kota yang sifatnya Makro
		Prosentase Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana kewilayahan	22,32%	45%	201,61%	
		Prosentase Usulan Masyarakat untuk Sarana Prasarana di Wilayah yang diakomodir	15%	13%	86,67%	

Sumber Data : Hasil Realisasi Kegiatan Kecamatan Blimbing Tahun 2021

### C. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Penyusunan target kinerja 2019-2023 didasarkan pada realisasi kinerja tahun 2021. Pengukuran realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 - 2023 disajikan pada tabel berikut :

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 87,89%** pada tahun 2021. Dengan sasaran dan indikator yang berbeda, pada tahun 2020 rata-rata capaian indikator sasaran adalah 86,48%. Dengan demikian, capaian kinerja sasaran Kecamatan Sukun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,01 %. Berdasarkan realisasi Tahun 2021, maka status capaian kinerja sasaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Status Capaian Kinerja  
Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Capaian	Status
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,94	Berhasil
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Mas) Kecamatan	4,26 Dengan capaian 99,36%	Berhasil
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	4,14 Dengan capaian 109%	Berhasil

Sumber: Data Kecamatan Blimbing diolah, 2021

**Tabel 3.2.**  
**Target dan Realisasi Kinerja Kecamatan Blimbing**  
**Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,38	80,21	80,52			100,40%	100,20%	100,40%		
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	80,21	80,94				100,26%	100,82%			
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	4,06	4,12	4,26			98%	97,86%	99,30%		
4.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,13	3,17	3,14			83,46%	83,46%	83,63%		

Sumber Data Renstra Kecamatan Blimbing 2018-2023

Capaian realisasi kinerja Tahun 2021 diperbandingkan dengan data Tahun 2020. Hal ini berguna untuk melihat trend kenaikan/ penurunan indikator kinerja yang berkaitan. Adapun perbandingan realisasi untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

a. Indikator kinerja sasaran : Nilai SAKIP perangkat daerah

Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Blimbing pada Tahun 2020 adalah 80,94, sehingga ada peningkatan sebesar 42 poin atau 0,52% pada tahun 2020 ini, karena capaian di Tahun 2020 dengan nilai 80,52.

Sasaran ini ditunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan didukung indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan :

- Persentase Dokumen, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu dengan target 100% realisasi 100%
- Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi Baik target 80%
- IKM Perangkat Daerah dengan target 80,2 dengan capaian realisasi 80,52

b) Sasaran strategis : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas

Indikator kinerja sasaran : Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy)  
Kecamatan

Indikator dimaksud didukung di oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Realisasi indikator ini pada Tahun 2021 sebesar 4,26 sedang pada tahun 2020 capaiannya 4,12 ada peningkatan sebesar 14 poin atau 3,39%.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pemberdayaan Masyarakat indikator sebagai bereikut:

1. Indikator 1 : Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator ini terealisasi sebesar 66% dari target sebesar 75%

2. Indikator 2: Rasio Linmas per RT

Indikator ini terealisasi sebesar 84% dari target 1

c) Sasaran strategis: Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu

Indikator kinerja sasaran : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana  
Publik

Realisasi kinerja indikator sasaran ini pada Tahun 2021 sebesar 4,14 dari target sedang Tahun 2020 terealisasi sebesar 83,46% untuk itu tidak bisa diukur atau diperbandingkan

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik dengan indikator:

1. Indikator 1 : Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Indikator ini terealisasi sebesar 45% atau kenaikan sebesar 22,32% dari tahun 2018.

2. Indikator 2 : Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator ini tercapai sebesar 13% atau meningkat sebesar 2,36% dari tahun 2020.

#### **D. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun inii dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.**

Analisis berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu tabulasi target jangka menengah sebagaimana dalam rencana strategis tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2021	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,28	80,38	80,21	80,52		
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	80,43	80,21	80,94			
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	4,29	4,06	4,12	4,26		
4.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,80	3,13	3,17	3,14		

Sumber: Data Kecamatan Blimbing diolah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dianalisis capaian kinerja untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- A. Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
1. Indikator kinerja sasaran : Nilai SAKIP perangkat daerah  
Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Blimbing pada Tahun 2020 adalah 80,94 dari target yang ditetapkan 80,43. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka sudah tercapai 100,63%. Artinya, untuk mencapai target jangka menengah pada tahun 2023, capaian Tahun 2020 sudah *tercapai* meskipun dibandingkan dengan target 2019.
  2. Sasaran Program
    - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    - c. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
    - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- B. Sasaran strategis : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas
1. Indikator kinerja sasaran: Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan  
Realisasi indikator ini pada Tahun 2021 sebesar 4,26 dari target 4,29 tingkat capaiannya karena pada Tahun 2020 belum ditetapkan target. Tetapi, jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka tingkat capaian baru mencapai 99,30%.
  2. Indikator Program
    - a. Indikator 1: Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif  
Indikator ini terealisasi sebesar 66% dengan capaian kinerja sebesar 88%. Sedang capaian terhadap target jangka menengah sebesar 75% sehingga diharapkan target kinerja jangka menengah dapat tercapai.
    - b. Indikator 2: Rasio Linmas per RT  
Indikator ini tercapai sebesar 86,50% dengan capaian kinerja terhadap target tahunan dan target jangka menengah sebesar 85,11%. Dilihat dari capaian ini maka untuk indikator Rasio Linmas per RT masih diperlukan usaha yang sangat keras untuk pencapaian kinerja di akhir periode.
- C. Sasaran strategis: Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu
1. Indikator kinerja sasaran : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik

Realisasi kinerja indikator sasaran ini pada Tahun 2021 mencapai 3,14 dengan capaian kinerja sebesar 3,80. Sedang target jangka menengah tercapai sebesar 82,63%. Artinya, baik target tahunan maupun target jangka menengah sudah tercapai. Dengan demikian, di tahun berikutnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja yang berkaitan dengan indikator ini.

## 2. Indikator Program

a. Indikator 1 : Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan

Indikator ini tercapai sebesar 45% dengan capaian kinerja tahunan sebesar 22,32% dan capaian kinerja jangka menengah sebesar 201,61%. Indikator ini juga telah mencapai target tahunan dan jangka menengah sehingga diperlukan penyesuaian untuk target ke depan.

b. Indikator 2 : Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Indikator ini terealisasi sebesar 13% dengan capaian kinerja tahunan sebesar 15% dan capaian kinerja jangka menengah sebesar 86,67%. Indikator ini masih memerlukan usaha yang cukup keras untuk mencapainya.

## Realisasi Kinerja

Dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Standar Nasional lainnya

Tiga indikator sasaran Kecamatan Blimbing tidak masuk dalam Standar Pelayanan Minimal ataupun standar nasional lainnya. Sebagai bahan perbandingan, digunakan capaian indikator yang berkaitan di beberapa pemerintah daerah lain. Hasil perbandingan masing-masing indikator ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4

### Realisasi Kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi kinerja	Rata-Rata Realisasi Daerah Lainnya	% Perbandingan dengan daerah lain
			2021	2021	2021
1	2	2	4	5	6
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,94	80,43	100,82%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan	Indeks Pembangunan Masyarakat Kecamatan	4,26	4,29	99,30%

	komunitas				
3	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks kepuasan layanan prasaarana sarana publik	3,14	3,80	83,63%

Sumber: Hasil Realisasi Kegiatan Kecamatan Blimbing, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa:

Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP perangkat daerah di Kecamatan Blimbing dikategorikan BERHASIL jika dibandingkan dengan capaian daerah-daerah lain. Nilai SAKIP kecamatan di daerah lain berkisar antara 78-80. Jika digunakan angka tertinggi sebagai perbandingan, maka capaian Kecamatan Blimbing adalah 80,94 di tahun 2020

Sasaran 2 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Meskipun tidak banyak, beberapa daerah telah mengukur indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung. Rata-rata indeks adalah 4,26 sehingga capaian Kecamatan Blimbing sebesar 99,30% dengan kategori BERHASIL.

Sasaran 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu.

Indikator kepuasan layanan prasarana sarana publik (IKLSarpras) merupakan turunan dari indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI). IKLSarpras adalah IKLI yang diukur di tingkat kecamatan. IKLSarpras di beberapa daerah mencapai 3,14 sehingga capaian Kecamatan Berhasil sebesar 83,63% dengan kategori BERHASIL.

#### 1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama Tahun 2021 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah di perjanjikan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran strategis : Meningkatkan kinerja pelayanan perangkat daerah capaian indikator 100% sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat di capai secara maksimal (100%) karena belum dilakukan evaluasi capaian indikator sasaran secara periodik sehingga program/kegiatan yang

direncanakan belum dapat mendukung capaian sasaran. Hal ini berpengaruh terhadap Nilai SAKIP perangkat daerah.

Indikator : Nilai SAKIP perangkat daerah telah terealisasi 80,94 sesuai dengan target dan dikategorikan BERHASIL di Tahun 2020.

- 2) Sasaran strategis : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas.

Meskipun pada Tahun 2021 ditetapkan target 4,29, tetapi jika dibandingkan dengan target yang diregresikan, maka capaian indikator adalah 99,30%. Untuk capaian ini belum bisa dinyatakan berhasilnya pencapaian sasaran ini disebabkan oleh belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan karena perencanaan kegiatan belum berbasis outcome. Di samping itu, juga meskipun adanya pencaangan kelurahan siaga yang ditopang oleh LINMAS, belum cukup berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dari sisi sosial.

Indikator : Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IPMas) Kecamatan terealisasi 4,26 atau mencapai 99,30% dari target yang diregresikan dengan kategori BERHASIL.

- 3) Sasaran strategis : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu.

Target sasaran ini pada Tahun 2021 telah tercapai sebesar 83,63%.

Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik terealisasi sebesar 3,14 dari target Tahun 2021 sebesar 3,80 dengan kategori BERHASIL.

2. Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber daya

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja tidak terlepas dengan kinerja anggaran. Karena itu analisis hasil pengukuran kinerja juga dilengkapi dengan analisis capaian anggaran. Realisasi anggaran untuk menunjang pencapaian masing-masing sasaran ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 3.5**  
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Anggaran			%
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	80,2	80,52	100,40%	20.310.240.820	16.966.832.606	83,54%	
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	80,43			5.246.469.701	4.909.949.077	93,59%	
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	4,29	4,26	99,30%	16.482.509.994	16.154.944.550	98,01%	
4.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,80	3,14	82,63%	3.522.073.485	3.488.204.439	99,04%	

Sumber: BPKAD Kota Malang, 2021  
Data Kecamatan Blimbing diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Indikator Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan capaian anggaran 83,54%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 4,47% dan efektivitas penggunaan dana sebesar 100,4%.
- 2) Indikator Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas dengan capaian kinerja 98,01% dan capaian anggaran 99,30%. Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa program dan kegiatan untuk mendukung sasaran ini dilaksanakan dengan efisiensi sebesar 1,29%.
- 3) Indikator Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu dengan capaian kinerja 99,04% dan capaian anggaran 82,63%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 16,41%. Artinya, program dan kegiatan untuk mendukung sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

Selanjutnya, capaian masing-masing kegiatan yang mendukung indikator program dapat dilihat pada lampiran 1.

Penjelasan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran 1 dengan indikator Nilai SAKIP perangkat daerah dari target Tahun 2021 sebesar 80,43 Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator 1 : Tingkat Publikasi Informasi, Indikator dimaksud didukung kegiatan :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD tercapai 100%
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tercapai 100%
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tercapai 100%
- d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tercapai 92%
- e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor tercapai 90%
- f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tercapai 67%
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tercapai 83%
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tercapai 91%
- i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tercapai 100%
- j. Penyediaan Jasa Surat Menyurat tercapai 72%
- k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tercapai tercapai 83%
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tercapai 100%
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tercapai 92%
- n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tercapai 88%
- o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tercapai 100%

Indikator 2 : Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu, Indikator tersebut didukung oleh Kegiatan

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tercapai 100%
  - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD tercapai 100%
  - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai 0%
  - d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tercapai 83%
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tercapai 100%
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
- Indikator program ini tercapai 100,40% dari target. Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja program adalah kegiatan :
- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan tercapai 0%
  - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Balarjosari tercapai 100%
  - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Arjosari tercapai 100%
  - d. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Polowijen tercapai 100%
  - e. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Purwodadi tercapai 100%
  - f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Blimbing tercapai 100%
  - g. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Pandawangi tercapai 100%
  - h. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Purwantoro tercapai 100%
  - i. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bunulrejo tercapai 100%
  - j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kesatrian tercapai 100%
  - k. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Polehan tercapai 100%
  - l. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Jodipan tercapai 100%

- m. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan tercapai 0%
- n. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Balarjosari tercapai 0%
- o. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Arjosari tercapai 0%
- p. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Polowijen tercapai 0%
- q. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Purwodadi tercapai 0%
- r. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Blimbing tercapai 100%
- s. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Pandanwangi tercapai 100%
- t. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Purwantoro tercapai 50%
- u. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Bunulrejo tercapai 100%
- v. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Polehan tercapai 0%
- w. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Jodipan tercapai 0%

Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas

Indikator : Indeks Pembangunan Masyarakat ( IP Masy) Kecamatan

Capaian indikator ini sebesar 99,30% dicapai melalui

Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator 1 : Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif

tercapai 88% melalui kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kecamatan tercapai 100%
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan Balarjosari tercapai 100%
- c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Arjosari tercapai 100%
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Polowijen tercapai 100%

- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Purwodadi tercapai 100%
- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Blimbing tercapai 100%
- g. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pandanwangi tercapai 100%
- h. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Purwantoro tercapai 100%
- i. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bunulrejo tercapai 100%
- j. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kesatrian tercapai 100%
- k. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Polehan tercapai 100%
- l. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jodipan tercapai 100%
- m. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Blimbing tercapai 88%
- n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Balarjosari tercapai 100%
- o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjosari tercapai 100%
- p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen tercapai 100%
- q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwodadi tercapai 100%
- r. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Blimbing tercapai 100%
- s. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pandanwangi tercapai 95%
- t. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwantoro tercapai 99%
- u. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bunulrejo tercapai 100%
- v. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian tercapai 99,85%
- w. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polehan tercapai 100%
- x. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jodipan tercapai 96%
- y. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Balarjosari tercapai 100%
- z. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kelurahan Arjosari tercapai 95,88%

- aa. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Polowijen tercapai 91%
- bb. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwodadi tercapai 99%
- cc. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Blimbing tercapai 99%
- dd. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pandanwangi tercapai 95%
- ee. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Purwantoro tercapai 100%
- ff. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bunulrejo tercapai 98%
- gg. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kesatrian tercapai 99,59%
- hh. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Polehan tercapai 97%
- ii. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jodipan tercapai 99%

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Saprasi Kota secara Terpadu

Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik

Capaian indikator ini sebesar 99,04% dicapai melalui

1. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik

Indikator 1 : Persentase pelaksanaan peningkatan Sarana Prasarana Publik tercapai 22,18%

Indikator 2 : Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir tercapai 19,70%

Dua Indikator ini tercapai melalui kegiatan :

- a. Evaluasi Kelurahan (Kecamatan Blimbing) tercapai 78%
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balearjosari tercapai 99,05%
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjosari tercapai 99,24%
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polowijen tercapai 97%
- e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwodadi tercapai 99%

- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Blimbing tercapai 100%
  - g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pandanwangi tercapai 100%
  - h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purwanto tercapai 98%
  - i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bunulrejo tercapai 100%
  - j. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kesatrian tercapai 99,50%
  - k. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Polehan tercapai 100%
  - l. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jodipan tercapai 99%
- D. Indikator Program yang belum tercapai adalah Rasio Linmas yaitu tercapai 64% dari target 1 Orang di setiap RT, Program ini merupakan pendukung sasaran 2 yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan komunitas. Kegiatan yang belum tercapai dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, ini adalah :
- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Blimbing) tercapai 71%
  - b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Balearjosari) tercapai 92%
  - c. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Arjosari) tercapai 95%
  - d. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polowijen) tercapai 97%
  - e. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwodadi) tercapai 99%
  - f. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Blimbing) tercapai 98%

- g. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandanwangi) tercapai 100%
- h. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwantoro) tercapai 100%
- i. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bunulrejo) tercapai 98%
- j. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kesatrian) tercapai 100%
- k. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polehan) tercapai 100%
- l. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jodipan) tercapai 93%

E. Sesuai dengan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut, upaya perbaikan yang sedang dan akan dilakukan untuk optimalisasi pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator Sasaran: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Program:

1. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
2. Tingkat publikasi informasi

Upaya Perbaikan:

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan database untuk pengolahan data
3. Meningkatkan sarana informasi warga dan mengaktifkan kelompok informasi masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas

Indikator Sasaran: Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan

Indikator Program:

1. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

2. Rasio Linmas per RT

Upaya Perbaikan:

1. Meningkatkan fasilitasi kegiatan bagi lembaga kemasyarakatan
2. Mengembangkan fokus pemberdayaan masyarakat dari ekonomi menjadi ekonomi produktif, sosial dan gender
3. Program Kelurahan Tangguh

Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu

Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Layanan prasarana sarana publik

Indikator Program:

1. Persentase pelaksanaan peningkatan sarpras kewilayahan
2. Rasio usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Upaya Perbaikan:

1. Melaksanakan pendataan sarpras dan monev kegiatan peningkatan sarpras
2. Membangun database untuk meningkatkan efektivitas layanan sarpras dan mengukur kepuasan layanan
3. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sebelum kegiatan musrenbangkel

## **E. Realisasi Anggaran.**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar 91% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 2.

Dari sisi anggaran, analisis realisasi dan capaian adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator Sasaran: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Program:

1. Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
2. Tingkat publikasi informasi
3. Nilai IKM Perangkat Daerah

Realisasi anggaran untuk indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 83,54%

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terealisasi sebesar 93,41%
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terealisasi sebesar 99,98%

Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas

Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMasy) Kecamatan

Indikator Program :

- 1. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
- 2. Rasio Linmas per RT

Realisasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terealisasi 95,93%
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan terealisasi 98,60%
- c. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan terealisasi 97,60%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan terealisasi 95,18%

Sasaran 3 : Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Layanan prasarana sarana publik

Indikator Program :

- 1. Persentase pelaksanaan peningkatan sarpras kewilayahan
- 2. Rasio usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir

Realisasi anggaran untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik, terealisasi sebesar 99,04%

# **BAB IV P E N U T U P**

## **1. KESIMPULAN**

Laporan kinerja Kecamatan Blimbing Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja dari unit-unit kerja serta seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Blimbing. Laporan kinerja juga memuat hasil analisis dan evaluasi pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2021. Ada 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator yang harus dicapai oleh Kecamatan Blimbing.

Secara umum ketiga sasaran telah dicapai dengan hasil :

- (i) Sasaran 1 tercapai 99,30%;
- (ii) Sasaran 2 tercapai 96,82%; dan
- (iii) Sasaran 3 tercapai 99%.

Capaian dari masing-masing indikator sasaran dan program adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai .....% melalui indikator program:
  - 1) Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu tercapai 100%
  - 2) Tingkat publikasi informasi tercapai 100%
  - 3) IKM Perangkat Daerah tercapai 100,40%
- B. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IP Masy) Kecamatan tercapai 82,18% melalui indikator program:
  - 1). Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif tercapai 88%
  - 2). Rasio Linmas per RT tercapai 64%
- C. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Prasarana dan Sarana Publik tercapai 99,04% melalui indikator program:
  - 1). Persentase pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kewilayahan tercapai 99,48%
  - 2). Persentase usulan masyarakat untuk prasarana sarana kewilayahan yang diakomodir tercapai 98,50%

## 2. TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Blimbing pada tahun 2022 kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan evaluasi pencapaian target kinerja secara periodik dengan menyiapkan kartu Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) untuk setiap pejabat struktural dan memberikan *reward and punishment*.
- b. Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan merancang kegiatan berbasis *outcome* serta melakukan pendampingan bagi kelompok-kelompok masyarakat produktif dan implementasi kelurahan siaga.
- c. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra, Renja, RKA sampai dengan PK dengan menyiapkan SOP perencanaan dan optimalisasi laskar perencana.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait. Rekomendasi di atas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam proses perencanaan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Blimbing.

Malang, Pebruari 2022

CAMAT BLIMBING



**ARYADI WARDOYO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19770811 199711 1 001